humanis

Dokumen Strategis untuk Organisasi Masyarakat Sipil

Memperkuat Kepemimpinan Perempuan dalam Aksi Iklim dan Tata Guna Lahan Berkelanjutan

Tentang Dokumen Strategis

Dokumen strategis ini disusun sebagai respons terhadap krisis iklim yang bersifat multidimensi dan memperdalam ketimpangan sosial, ekonomi, dan gender, di mana perempuan—terutama dari kelompok adat, perdesaan, pesisir, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya—menanggung dampak paling berat meskipun memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan hidup.

Perempuan—terutama dari kelompok adat, pedesaan, pesisir, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya—menanggung dampak paling berat meskipun memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan hidup.

Sayangnya, pengalaman dan kepemimpinan mereka masih belum diakui secara memadai dalam kebijakan dan program iklim.

Berangkat dari kesadaran ini, **Humanis bersama 35 perempuan dari 30 organisasi masyarakat sipil di berbagai wilayah Indonesia membangun proses pembelajaran kolektif** yang partisipatif, menggabungkan pengalaman akar rumput, pendekatan sistem berpikir, dan kerangka keberlanjutan lintas sektor dan wilayah.

Dokumen ini bertujuan memperkuat kepemimpinan perempuan dalam aksi iklim dan tata guna lahan berkelanjutan melalui strategi berbasis bukti, interseksionalitas, dan pengetahuan lokal, serta menjadi seruan kolektif untuk mewujudkan keadilan iklim dan kesetaraan gender secara sistemik dan inklusif.

humanis

Penyusunan Dokumen Strategis

26

Narasumber terlibat dalam keseluruhan proses penyusunan dokumen

30

Organisasi Masyarakat Sipil terlibat Workshop Penyusunan Dokumen Strategis

7

Sesi Ruang Berbagi terlaksana (Juni - November 2024)

Tujuan Dokumen Strategis

1

Menampilkan peran dan kepemimpinan perempuan, termasuk perempuan disabilitas, perempuan adat, dan kelompok terpinggirkan, dalam aksi iklim dan tata guna lahan berkelanjutan.

2

Meningkatkan kesadaran kritis tentang pentingnya kepemimpinan perempuan dalam isu iklim dan lingkungan.

3

Mendokumentasikan pengalaman perempuan pemimpin dalam menjaga lingkungan dan sumber daya alam.

4

Menyusun strategi nyata untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dalam aksi iklim dan tata guna lahan.

5

Mendorong kolaborasi lintas sektor demi kepemimpinan perempuan yang inklusif dan berdaya.

Tahapan Penyusunan Dokumen

Series learning Session
Juni - Nov 2024

Workshop penyusunan strategi nasional
Des 2024

Gender and Climate Forum
Juni 2025

Aksi paska Gender & Climate Forum

Metode Penyusunan Strategi

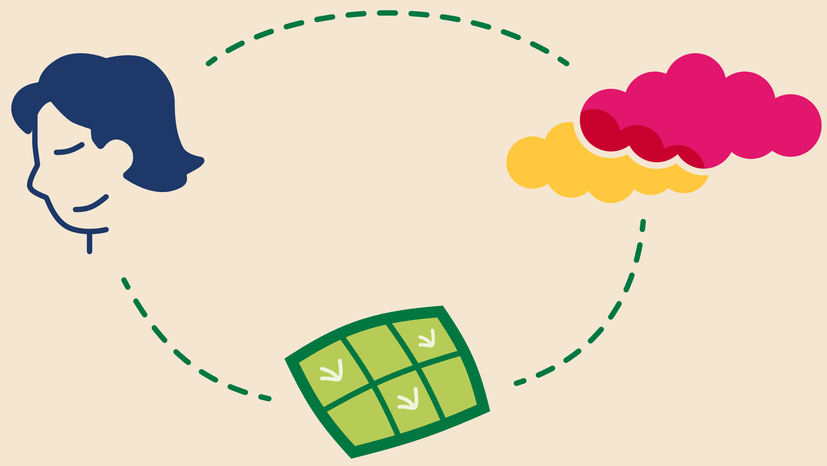

Menggunakan cara berpikir sistem *(systems thinking)* untuk mengaitkan isu gender, tata guna lahan, dan perubahan iklim secara menyeluruh.

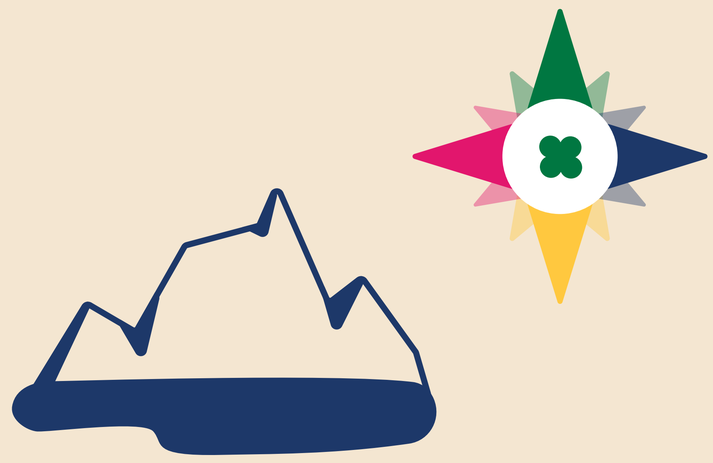

Menggabungkan Analisis Gunung Es *(Iceberg Analysis)* dan Kompas Keberlanjutan *(Atkisson Sustainability Accelerator Tools)* sebagai alat bantu analisis dan diskusi.

Analisis Gunung Es

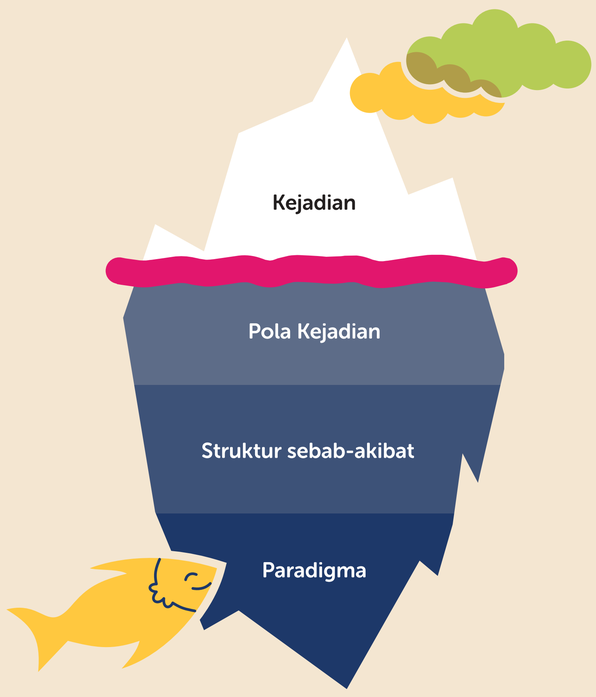

Analisis Gunung Es meliputi:

1. Kejadian *(events)*
2. Pola kejadian *(behavior overtime diagram/ BoT)*
3. Struktur sebab-akibat *(Causal Loop Diagram/CLD)*
4. Paradigma *(mental model)*

Kompas Keberlanjutan

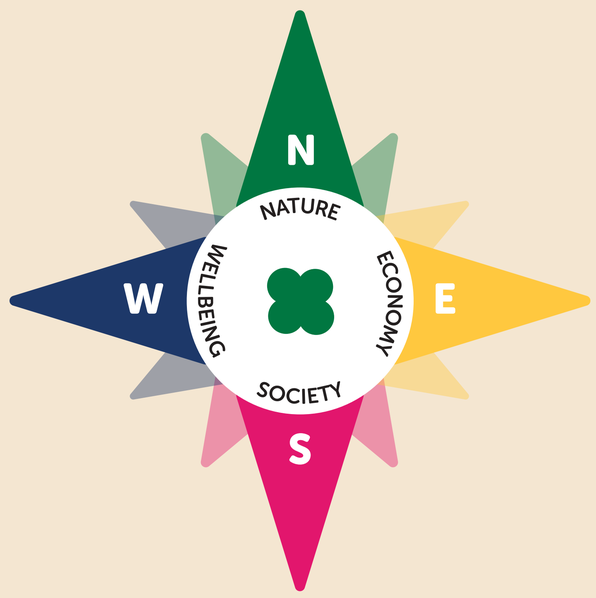

Kompas Keberlanjutan:
N = Nature (Alam)
S = Social (Sosial)
E = Economy (Ekonomi)
W = Wellbeing (Kualitas Hidup)

Metode GALS

Metode ***Gender Action Learning for Sustainability*** **(GALS)** dipakai untuk menangkap visi, misi, tantangan, dan solusi dari perspektif perempuan.

humanis

Perempuan dan Kelompok Terpinggirkan Dalam Konteks Perubahan Iklim

Perubahan Iklim Memperparah Ketimpangan Sosial

- Perubahan iklim tidak hanya menjadi krisis lingkungan, tetapi juga memperparah ketidakadilan sosial. **Dampaknya merambah ke sektor ekonomi, sosial, dan ekologi.**
- Di Indonesia, kelompok seperti **perempuan, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan komunitas miskin** kota/desa menghadapi risiko berlipat akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya, layanan dasar, dan ruang pengambilan keputusan.
- Dalam konteks ini, perubahan iklim **memperdalam jurang ketimpangan** yang sudah ada sebelumnya

Dampak Perubahan Iklim pada Kehidupan dan Penghidupan

- Perempuan memiliki peran kunci dalam sektor agraris dan perikanan, tetapi **sebagian besar tidak diakui secara legal sebagai petani atau nelayan** karena minimnya sertifikasi, status hukum, dan patriarki struktural.
- Bencana iklim seperti banjir dan kekeringan menyebabkan **gagal panen, berkurangnya hasil tangkapan, dan kerusakan infrastruktur dasar,** yang memperburuk kerentanan ekonomi rumah tangga yang dikelola perempuan.
- Laporan KLHK 2024 menyebutkan bahwa **60% wilayah pertanian di Indonesia kini terancam kekeringan ekstrem secara berkala** akibat El Niño dan perubahan pola curah hujan.

Akses & Kontrol Ekonomi Perempuan dalam Konteks Perubahan Iklim

- Data BPS menunjukkan bahwa **lebih dari 70% perempuan petani tidak memiliki hak atas tanah yang mereka kelola,** menghambat akses terhadap subsidi, pelatihan, dan skema bantuan iklim seperti asuransi pertanian.
- **Kredit mikro dan teknologi adaptif** seperti irigasi hemat air atau benih tahan kekeringan **masih sulit diakses oleh perempuan, khususnya di wilayah 3T** (tertinggal, terdepan, terluar).
- Upah perempuan dalam sektor informal dan agrikultur masih **23% lebih rendah dari laki-laki (SAKERNAS 2023),** menandakan ketimpangan struktural yang menghambat ketahanan adaptif perempuan.

Perubahan Iklim dan Beban Kerja Ganda yang Tidak Terlihat

- Perempuan menjalani beban kerja berlapis: **kerja produktif (ladang, pasar), kerja reproduktif (mengurus keluarga), dan kerja komunitas (gotong royong, posyandu),** yang sebagian besar tidak diakui secara ekonomi maupun kebijakan.
- **Saat terjadi krisis iklim, beban ini meningkat.** Misalnya, saat kekeringan, perempuan harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari air bersih atau memasak dengan sumber energi alternatif.

Perubahan Iklim dan Akses Perempuan ke Sumber Daya Alam

- Perubahan iklim **memperparah kelangkaan sumber daya alam** seperti air, kayu bakar, dan pangan lokal.
- Di beberapa wilayah seperti NTT, **perempuan harus berjalan lebih dari 5 km untuk mendapatkan air bersih saat musim kemarau** (data WALHI 2023).
- Deforestasi, alih fungsi lahan, dan degradasi ekosistem juga **menurunkan produktivitas lahan garapan perempuan.**

Kontribusi Perempuan Dalam Perubahan Iklim

- **Di tengah keterbatasan, perempuan justru menjadi agen penting dalam konservasi dan solusi iklim berbasis komunitas.**

Contoh praktik baik:

- Lumbung pangan adat di Kasepuhan Ciptagelar (Jawa Barat)
- Pohon kehidupan yang dijaga oleh komunitas perempuan di hutan adat Aceh dan Bengkulu
- Perempuan petani CSA (climate-smart agriculture) dalam kelompok Tani Sauyunan, Bandung
- Perempuan di Wadas dan TTS yang menolak tambang sebagai bentuk perlindungan ruang hidup

Perubahan Iklim dan Peran Perempuan di Wilayah Perkotaan

- Di kota, **perempuan memimpin banyak inisiatif** pengelolaan limbah rumah tangga, bank sampah, dan edukasi gaya hidup minim jejak karbon.
- **Perempuan juga aktif dalam gerakan solidaritas komunitas,** seperti dapur umum berbasis komunitas saat banjir Jakarta, atau posko pengungsian mandiri saat kebakaran di pemukiman padat.

Perubahan Iklim dan Risiko Kekerasan Berbasis Gender

- Bencana dan krisis iklim **meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender (KBG),** perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja perempuan, dan pernikahan dini sebagai strategi bertahan.
- Di lokasi pengungsian pasca bencana, seperti di Palu dan Lombok, dilaporkan **meningkatnya kasus KBG karena fasilitas yang tidak ramah perempuan dan minimnya sistem perlindungan yang responsif gender** (Komnas Perempuan, 2023).

humanis

Kebijakan-Kebijakan terkait Perempuan dan Perubahan Iklim

KEBIJAKAN INTERNASIONAL

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/* CEDAW) – Rekomendasi Umum No. 37
1979

- Mengaitkan gender dan perubahan iklim
- Mendorong kebijakan inklusif yang menjamin hak perempuan dan akses terhadap sumber daya iklim

UNFCCC
1992

- Perjanjian utama perubahan iklim global
- Sejak COP7 (2001) mulai mengakui pentingnya partisipasi perempuan
- COP25 (2019) luncurkan Program Kerja Gender dan Rencana Aksi Gender yang diperkuat

Deklarasi Beijing dan Platform untuk Aksi (Platform for Action/ BPfA)
1995

- Menekankan peran perempuan dalam pengambilan keputusan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
- Perbaruan BpfA+30 dorong kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan

Lima Work Programme on Gender
2014

- Integrasi perspektif gender dalam implementasi UNFCCC dan Perjanjian Paris
- Fokus pada 5 area prioritas untuk pengarusutamaan gender di aksi iklim

Perjanjian Paris
2015

- Tujuan membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C
- Pasal 7 & 11 menekankan pendekatan berbasis gender dalam adaptasi dan peningkatan kapasitas

Sustainable Development Goals (SDGs)
2015

- SDG 5: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- SDG 13: Aksi Iklim dengan pendekatan inklusif dan responsif gender

Sendai Fremework for Disaster Risk Reduction
2015-2030

- Mengakui ketimpangan gender meningkatkan kerentanan bencana
- Dorong partisipasi aktif perempuan dalam pengurangan risiko bencana

humanis

Kebijakan-Kebijakan terkait Perempuan dan Perubahan Iklim

KEBIJAKAN NASIONAL

UU Pokok Agraria No. 5/1960
1960

- Menjamin hak perempuan atas tanah (Pasal 9)
- Tantangan budaya patriarki dalam pengakuan hak perempuan atas tanah

Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender (Stranas PUG)
2000

- Integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
- Penguatan kapasitas pelaksana PPRG di kementerian dan daerah

Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI)
2012

- Kerjasama KemenPPPA dan KLHK
- Mendorong pembangunan responsif gender dan inklusi sosial dalam mitigasi dan adaptasi iklim

Permen LHK No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial
2016

- Akses legal masyarakat kelola hutan lestari
- Peluang bagi perempuan dan kelompok rentan terlibat dalam pengelolaan hutan

Permen LHK No. P.30/2017 tentang Pengurangan Risiko Bencana
2017

- Memperkuat ketangguhan bencana dengan pelibatan perempuan dan kelompok rentan
- Mendukung pengarusutamaan gender di sektor lingkungan dan kehutanan

UU No. 16/2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan
2019

- Menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun
- Melindungi perempuan dari perkawinan dini yang dipengaruhi krisis iklim

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024

- Fokus pada pengarusutamaan gender, inklusi sosial, dan perubahan iklim
- Dorong partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam kebijakan iklim

Perpres No. 98/2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon
2021

- Mekanisme pengurangan emisi gas rumah kaca
- Memperhatikan peran dan akses perempuan dalam mitigasi dan adaptasi

humanis

Tantangan-Tantangan Kepemimpinan Perempuan dalam Aksi Iklim dan Tata Guna Lahan Berkelanjutan

Tantangan Internal

1. Perempuan kerap terjebak zona nyaman dan kurang kesadaran kritis
2. Enggan mengembangkan diri dan keterampilan komunikasi terbatas
3. Ketergantungan finansial dan pola pikir transaksional
4. Kesulitan membaca dan menulis, kurang percaya diri
5. Tekanan batin akibat stigma sosial dan stereotip gender
6. Tantangan internal berakar pada stigma dan stereotip yang membelenggu perempuan

1. Minimnya dukungan dari keluarga dan sesama perempuan
2. Terbatasnya akses ke ruang pengambilan keputusan
3. Hambatan adat dan budaya yang membatasi peran perempuan
4. Beban ganda, diskriminasi kebijakan, dan hambatan struktural
5. Kebijakan diskriminatif seperti aturan pembulatan ke bawah dalam UU Pemilu
6. Definisi “nelayan” yang bias gender mengabaikan peran perempuan di sektor perikanan
7. Syarat pendidikan minimal calon kepala desa menghambat partisipasi perempuan di perdesaan
8. Kebijakan anggaran dan program pembangunan yang tidak sensitif gender
9. Akses teknologi timpang, ancaman kriminalisasi, dan stigmatisasi terhadap pembela lingkungan perempuan

Tantangan Eksternal

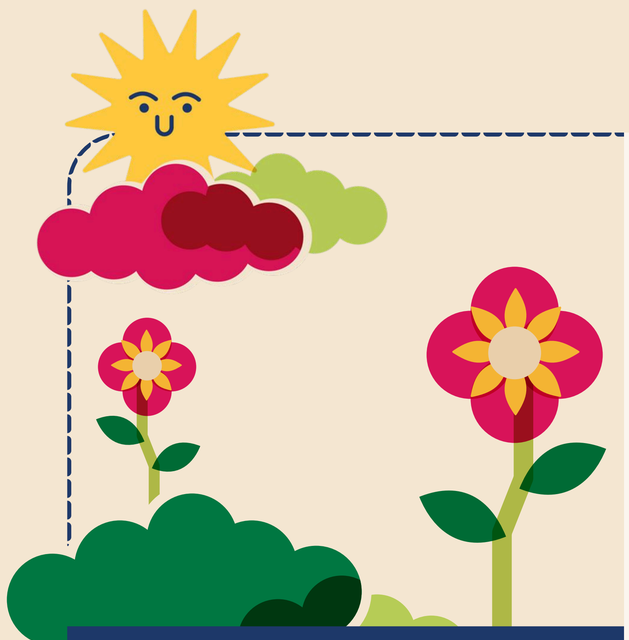

Ketimpangan Gender dalam Sumber Daya dan Pengambilan Keputusan

1. Kepemilikan dan kontrol tanah bergeser ke laki-laki, mengurangi akses perempuan
2. Peran kerja produktif, reproduktif, dan konservasi yang tidak seimbang
3. Pengambilan keputusan dan kepemilikan sering didominasi laki-laki
4. Stigma patriarkis memperkuat ketidaksetaraan, bahkan menekan perempuan pekerja, janda, dan penyandang disabilitas
5. Intimidasi, teror, dan kekerasan berbasis gender masih terjadi

humanis

Tantangan-Tantangan Kepemimpinan Perempuan dalam Aksi Iklim dan Tata Guna Lahan Berkelanjutan

1. Perempuan adat menghadapi hambatan pengakuan hak wilayah dan partisipasi
2. Perempuan dengan disabilitas menghadapi diskriminasi ganda dan keterbatasan akses
3. Hambatan bersifat lapisan-lapisan kerentanan yang saling beririsan

Tantangan Spesifik Berdasarkan Identitas

Akar Masalah Sistemik

1. Sistem ekonomi kapitalisme berorientasi akumulasi tanpa batas merusak lingkungan
2. Kekerasan ekologis menciptakan kesenjangan sosial yang mendalam
3. Krisis iklim adalah krisis keadilan sosial dan gender
4. Perlu perubahan sistemik menuju ekonomi yang adil, lestari, dan inklusif

1. Perempuan pembela lingkungan berada di garis depan perlindungan ekosistem
2. Menghadapi risiko kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan berbasis gender
3. Perlindungan dan pengakuan terhadap mereka masih minim
4. Pentingnya implementasi UU Perlindungan Lingkungan (Pasal 66 UUPLH) dan advokasi berbasis pengalaman perempuan

Peran dan Risiko Perempuan Pembela Lingkungan

humanis

Teori Perubahan:
Kepemimpinan Perempuan dalam Aksi Iklim dan Tata Guna Lahan Berkelanjutan

VISI

Terwujudnya kepemimpinan perempuan yang berdaulat dalam aksi iklim dan tata guna lahan berkelanjutan yang mampu mendorong transformasi sosial untuk dunia yang lestari, adil, dan setara, serta bebas stigma, kekerasan dan diskriminasi demi generasi kini dan nanti.

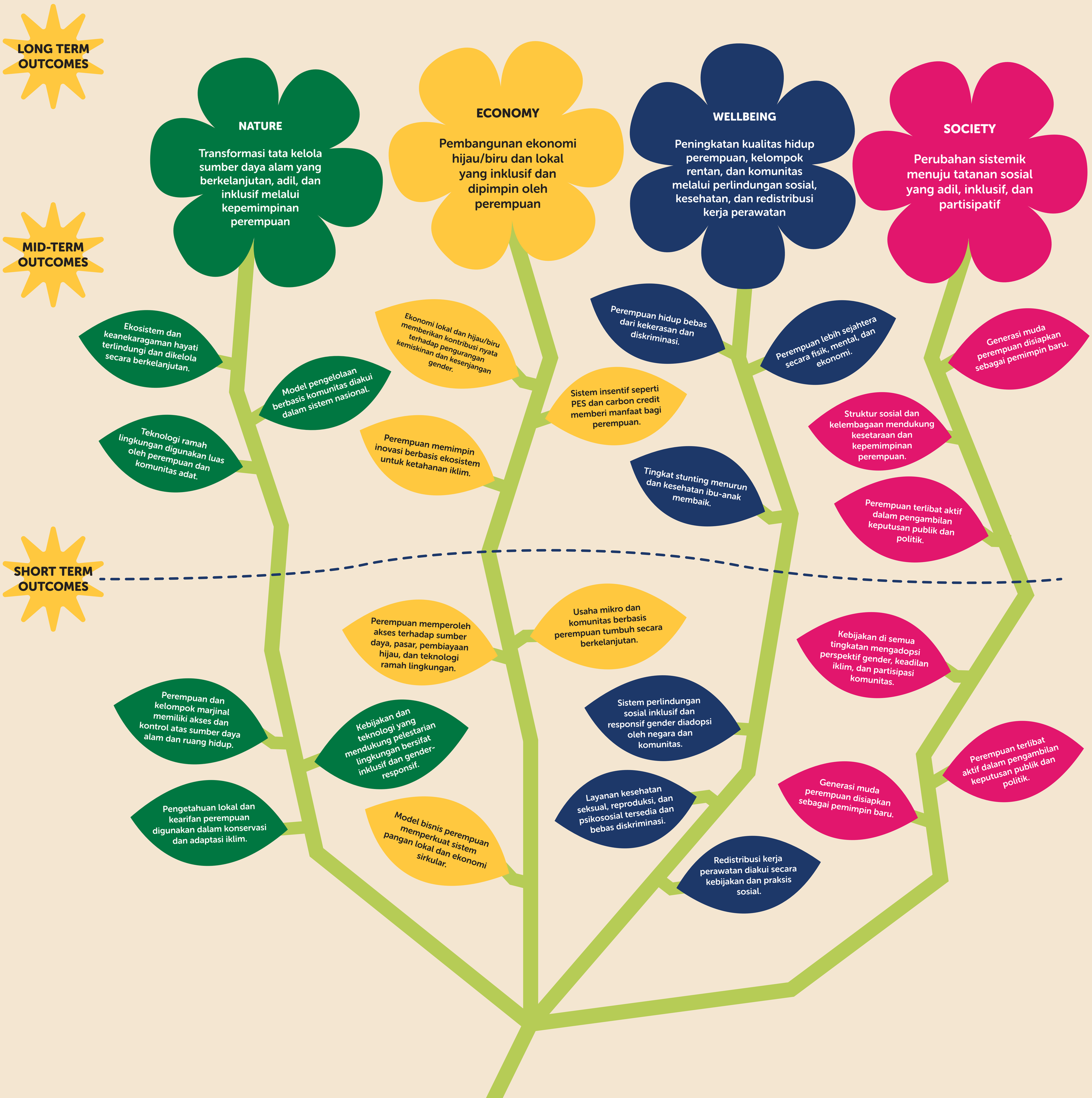

humanis

Teori Perubahan:
Strategi dan Ide Program/Aktivitas

1
Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan
Outcomes: NATURE, WELLBEING

- Pendidikan Kritis & Inklusif
- Kampanye Kesadaran & transformasi nilai sosial (norma, budaya)
- Partisipasi Setara
- Advokasi kebijakan & praktik responsif GEDSI
- Penyediaan Layanan Inklusif
- Lanjutkan dan kembangkan pendekatan berbasis komunitas & lintas sektor
- Data & pemantauan berbasis gender

2
Perempuan Jaga Alam dari Krisis Iklim
Outcome: NATURE

- Dorong pengakuan formal terhadap peran perempuan adat dan komunitas
- Pelibatan bermakna perempuan
- Bentuk narasi aksi iklim berperspektif perlindungan kehidupan
- Integrasi GEDSI dalam aksi iklim
- Perkuat daya tahan perempuan & kelompok rentan
- Tingkatkan akses dan kemampuan perempuan & kelompok rentan

3
Meningkatkan akses & kontrol perempuan terhadap sumber daya
Outcome: ECONOMY

- Pengembangan & penguatan kapasitas
- Advokasi lintas sektor dan kebijakan akses
- Lawan sistem oligarki sumber daya
- Pengorganisasian perempuan untuk perjuangan hak atas alam

4
Solidaritas untuk pengembangan ekonomi dan pangan lokal
Outcome: ECONOMY

- Membangun Kemandirian Pangan
- Penerapan Pola Hidup Berkelanjutan
- Mendorong inovasi produk lokal
- Dukungan pembiayaan hijau & koperasi perempuan
- Pelatihan & advokasi akses perempuan terhadap payment for environmental services (PES), carbon market, pembiayaan hijau

5
Transfer pengetahuan lintas generasi
Outcomes: NATURE, WELLBEING, SOCIETY

- Pendokumentasian & penyebaran pengetahuan, nilai dan pengalaman perempuan dalam pengelolaan alam
- Peningkatan kapasitas & pembelajaran lintas generasi, pemangku kepentingan dan isu

6
Memastikan kebijakan dan teknologi yang adil gender & inklusif
Outcomes: NATURE, SOCIETY

- Pelatihan bagi pembuat kebijakan & perancang teknologi.
- Inovasi dan adopsi teknologi oleh komunitas lokal.
- Advokasi & promosi kebijakan & teknologi yang adil gender & inklusif serta batalkan kebijakan diskriminatif.
- Alokasi anggaran khusus perempuan & teknologi ramah perempuan.

7
Regenerasi pemimpin perempuan
Outcomes: ECONOMY, WELLBEING, SOCIETY

- Pendidikan kritis untuk regenerasi pemimpin perempuan melalui sekolah perempuan, pelatihan, kunjungan silang.
- Perluas jejaring & kolaborasi pemimpin perempuan.
- Mendorong pemimpin perempuan di parlemen & ruang publik melalui kuota, pendidikan politik
- Advokasi Perencanaan & Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagai Indikator Kerja Utama (IKU) pemerintah.
- Transfer nilai & pengalaman antar pemimpin perempuan lintas generasi.
- Ciptakan ruang aman bagi pemimpin perempuan muda.

Catatan:
1. *Beberapa ide menjawab lebih dari satu strategi.*
2. *Beberapa ide adalah prasyarat untuk strategi lain.*
3. *Ide-ide ini dapat dikembangkan sesuai konteks lokal.*

humanis

Teori Perubahan:
Prinsip-Prinsip dan Nilai-Nilai Kepemimpinan Perempuan

PRINSIP-PRINSIP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Mendengarkan dan mengakui suara perempuan

Partisipasi Aktif Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Pengakuan terhadap pengetahuan dan pengalaman perempuan

Mengakui dan mendukung kepemimpinan perempuan

NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

1. Solidaritas
2. Interseksionalitas
3. Integritas
4. Akuntabilitas
5. Partisipatoris
6. Inklusivitas

humanis

Indikator Utama Teori Perubahan Berdasarkan Empat Kategori Kompas Keberlanjutan

Nature

Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Alam

1. Persentase wilayah perairan/laut yang bebas dari polusi sampah dan pencemaran lainnya.
2. Tingkat penurunan deforestasi dan degradasi lahan.
3. Luas hutan alam dan kawasan konservasi yang berada dalam skema perlindungan.
4. Indeks keanekaragaman hayati di wilayah darat dan perairan.

Akses dan Kontrol terhadap Sumber Daya Alam

1. Persentase perempuan dan kelompok terpinggirkan yang memiliki akses terhadap sumber daya alam dan hak tenurial.
2. Jumlah kebijakan yang telah diimplementasikan untuk pembangunan inklusif, adil, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.
3. Persentase perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam.
4. Jumlah kasus perubahan kepemilikan lahan yang berdampak pada hak perempuan dan komunitas lokal.
5. Jumlah teknologi ramah lingkungan yang dapat diakses oleh petani dan masyarakat adat.

Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan

1. Jumlah program yang berfokus pada pemulihan ekosistem dan lingkungan.
2. Jumlah program pengolahan sampah berbasis komunitas dan ekonomi sirkular.
3. Jumlah industri ekstraktif (termasuk tambang pasir) yang memiliki mekanisme pengelolaan lingkungan hidup.
4. Indeks kualitas udara berdasarkan kadar emisi karbon dan polutan lainnya.

Economy

Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Ekonomi

1. Persentase perempuan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro yang memiliki akses terhadap pasar lokal, nasional, dan internasional.
2. Persentase perempuan yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi mikro, ekonomi biru, ekonomi hijau, serta pendanaan inovatif.
3. Persentase perempuan yang terlibat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait ekonomi hijau, mikro, dan biru.
4. Persentase perempuan pelaku usaha mikro yang memperoleh akses ke pasar ekspor dan *e-commerce.*
5. Persentase perempuan yang mendapatkan akses ke teknologi ramah lingkungan dalam sektor pertanian, energi terbarukan, dan industri hijau.
6. Jumlah perempuan yang memimpin atau menjadi anggota dalam kelompok pengelola sumber daya alam (hutan adat, koperasi hijau, kelompok tani hutan, dll.).
7. Jumlah perempuan yang mengakses skema pembayaran berbasis ekosistem (PES - *Payment for Ecosystem Services*) atau mekanisme *carbon credit.*
8. Jumlah perempuan yang menjadi inovator dalam solusi berbasis alam *(nature-based solutions)* untuk mitigasi/adaptasi perubahan iklim.

Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

1. Jumlah investasi hijau yang bersifat inklusif, berkelanjutan, dan berbasis komunitas.
2. Jumlah usaha agroforestri berbasis perempuan yang berkembang secara ekonomi dan ekologis.
3. Jumlah perempuan pemimpin usaha di sektor ekonomi hijau, seperti energi terbarukan, agroforestri, dan konservasi.
4. Persentase petani yang memperoleh akses ke lembaga pendanaan untuk pertanian.
5. Persentase perempuan yang memperoleh akses terhadap skema pembiayaan hijau dan investasi berkelanjutan.

Kesetaraan dan Inklusivitas Ekonomi

1. Persentase penurunan angka kemiskinan perempuan serta perempuan kepala keluarga.
2. Rasio kesetaraan penghasilan antara perempuan dan laki-laki di sektor formal dan informal.
3. Persentase alokasi anggaran pemerintah dan sektor swasta untuk program yang responsif terhadap kesetaraan gender *(gender budgeting).*

humanis

Indikator Utama Teori Perubahan Berdasarkan Empat Kategori Kompas Keberlanjutan

Wellbeing (Kualitas Hidup)

Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan

1. Persentase kelompok rentan (perempuan, disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok miskin perkotaan) yang memiliki akses terhadap layanan kesehatan berkualitas tanpa diskriminasi.
2. Prevalensi stunting di kalangan anak-anak serta efektivitas intervensi kesehatan ibu dan anak.
3. Persentase perempuan yang memiliki akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang inklusif dan berbasis hak.

Keamanan dan Perlindungan Sosial

1. Persentase penurunan kasus kekerasan berbasis gender, termasuk terhadap perempuan pembela HAM, lingkungan, dan kelompok minoritas.
2. Jumlah kebijakan yang telah diimplementasikan untuk memperkuat ekosistem perlindungan perempuan pembela HAM dan lingkungan dengan pendekatan keamanan holistik dan komunitas.
3. Jumlah program atau kebijakan yang mengakui, mendukung, dan mengurangi beban kerja perawatan perempuan melalui skema perlindungan sosial dan ekonomi.
4. Persentase perempuan pekerja di sektor formal dan informal yang menerima upah layak serta memiliki akses terhadap perlindungan sosial dan jaminan ketenagakerjaan.
5. Jumlah kebijakan afirmatif yang mendukung kesejahteraan dan perlindungan perempuan pekerja di sektor formal dan informal.

Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Perempuan

1. Persentase peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan politik, publik, dan tata kelola sumber daya alam (DPR, DPRD, desa, sektor swasta, dll.).
2. Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan atau program peningkatan kapasitas dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, energi terbarukan, serta ekonomi hijau.
3. Persentase perempuan yang memiliki keterampilan dan akses terhadap teknologi berkualitas untuk mendukung pekerjaan, inovasi, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.
4. Persentase peningkatan dukungan keluarga terhadap partisipasi perempuan dalam aktivitas sosial dan ekonomi, termasuk dalam redistribusi kerja domestik.

Society

Kebijakan dan Regulasi untuk Kesetaraan Gender

1. Jumlah kebijakan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan desa yang mengintegrasikan perspektif gender dalam pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, sosial, serta mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim.
2. Jumlah kebijakan keadilan iklim di tingkat lokal yang telah diimplementasikan dan memiliki dampak nyata pada kelompok rentan, termasuk perempuan dan masyarakat adat.
3. Persentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan dan keadilan gender berdasarkan evaluasi kampanye publik dan perubahan perilaku sosial.
4. Jumlah kebijakan lingkungan dan tata guna lahan yang mencantumkan peran dan kepemimpinan perempuan, serta tingkat keterlibatan perempuan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan tersebut.

Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

1. Persentase penurunan kasus kekerasan berbasis gender, termasuk terhadap perempuan pembela HAM, lingkungan, dan kelompok minoritas.
2. Jumlah kebijakan yang telah diimplementasikan untuk memperkuat ekosistem perlindungan perempuan pembela HAM dan lingkungan dengan pendekatan keamanan holistik dan komunitas.
3. Jumlah program atau kebijakan yang mengakui, mendukung, dan mengurangi beban kerja perawatan perempuan melalui skema perlindungan sosial dan ekonomi.
4. Persentase perempuan pekerja di sektor formal dan informal yang menerima upah layak serta memiliki akses terhadap perlindungan sosial dan jaminan ketenagakerjaan.
5. Jumlah kebijakan afirmatif yang mendukung kesejahteraan dan perlindungan perempuan pekerja di sektor formal dan informal.

Pendidikan dan Inklusi Sosial

1. Persentase peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan politik, publik, dan tata kelola sumber daya alam (DPR, DPRD, desa, sektor swasta, dll.).
2. Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan atau program peningkatan kapasitas dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, energi terbarukan, serta ekonomi hijau.
3. Persentase perempuan yang memiliki keterampilan dan akses terhadap teknologi berkualitas untuk mendukung pekerjaan, inovasi, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.
4. Persentase peningkatan dukungan keluarga terhadap partisipasi perempuan dalam aktivitas sosial dan ekonomi, termasuk dalam redistribusi kerja domestik.

Rekomendasi

humanis

Rekomendasi Untuk Pemerintah

Integrasi Gender & Inklusi Sosial dalam Kebijakan Iklim

Strategi 6

1. Integrasikan perspektif gender & sosial dalam kebijakan lingkungan dan tata guna lahan
2. Alokasikan anggaran khusus untuk pemberdayaan perempuan & kelompok terpinggirkan
3. Perkuat monitoring & evaluasi berbasis gender dan inklusi sosial
4. Pastikan indikator GEDSI masuk dalam anggaran program iklim
5. Gunakan data terpilah gender untuk analisis kebijakan
6. Masukkan perspektif HAM dalam program perubahan iklim

Peningkatan Kapasitas & Partisipasi Perempuan

Strategi 3 5 6 7

1. Sediakan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan, khususnya kelompok rentan
2. Tingkatkan akses terhadap informasi, teknologi & sumber daya
3. Bangun program beasiswa/insentif di bidang lingkungan & keberlanjutan
4. Tingkatkan literasi birokrasi & akses terhadap jaminan sosial

Reformasi Kebijakan & Regulasi

Strategi 3 6

1. Tinjau ulang kebijakan yang bias gender & eksklusif
2. Dorong afirmasi keterwakilan perempuan di sektor kehutanan, pertanian, energi
3. Berikan insentif bagi komunitas/perusahaan yang mendukung kepemimpinan perempuan
4. Bangun birokrasi yang inklusif & ramah masyarakat lokal
5. Libatkan perempuan dalam penyusunan program & kebijakan
6. Gunakan praktik baik untuk merumuskan kebijakan
7. Perkuat data terpilah gender dalam perencanaan pembangunan

Penguatan Jaringan & Kolaborasi

Strategi 5 7

1. Bangun sinergi multipihak (pemerintah, CSO, akademisi, swasta, media)
2. Fasilitasi forum diskusi rutin bagi perempuan pemimpin lingkungan
3. Kembangkan jaring pengaman ekonomi untuk adaptasi iklim
4. Sediakan jaminan sosial untuk petani & nelayan perempuan skala kecil, disabilitas dan kelompok rentan
5. Bangun sinergi lintas wilayah dari hulu ke hilir dalam pengelolaan SDA

Perlindungan & Pengakuan Hak Perempuan

Strategi 1 6

1. Lindungi perempuan pemimpin dari intimidasi, diskriminasi & kekerasan
2. Sediakan layanan terpadu (one-stop service) bagi korban kekerasan & pejuang lingkungan
3. Akui secara legal peran & hak perempuan dalam pengelolaan SDA
4. Lindungi hak atas benih lokal & keanekaragaman hayati sebagai bagian dari keadilan agrarian

Rekomendasi

humanis

Rekomendasi Untuk Organisasi Masyarakat Sipil

Meningkatkan Kapasitas & Pendidikan

Strategi 7

1. Adakan pelatihan kepemimpinan, advokasi, dan literasi iklim bagi perempuan terdampak
2. Sediakan mentoring untuk perempuan pemimpin lokal
3. Bangun kapasitas advokasi berbasis bukti & strategi negosiasi
4. Integrasikan GEDSI dalam pendidikan dan literasi keadilan iklim
5. Kembangkan pemikiran kritis terhadap solusi semu iklim yang merugikan lingkungan

Meningkatkan Partisipasi & Representasi

Strategi 6 7

1. Dorong keterlibatan perempuan dalam forum kebijakan lingkungan & iklim
2. Fasilitasi perempuan untuk mengisi posisi kepemimpinan di organisasi lingkungan & pemerintahan desa

Membangun Jaringan & Solidaritas

Strategi 5 7

1. Perkuat jejaring perempuan pemimpin lingkungan untuk berbagi strategi & pengalaman
2. Bangun aliansi antar-CSO untuk advokasi kebijakan yang inklusif & berpihak
3. Libatkan akademisi dalam memperkuat perjuangan hak tanah adat & ulayat

Advokasi Kebijakan Responsif Gender & Inklusi Sosial

Strategi 6

1. Advokasi kebijakan iklim & tata guna lahan yang responsif gender (lokal, nasional, global)
2. Dorong penerapan anggaran responsif gender untuk mitigasi dan adaptasi iklim

Perlindungan Hak & Keamanan Perempuan Pemimpin

Strategi 1 6

1. Sediakan mekanisme perlindungan dari intimidasi, kriminalisasi & kekerasan
2. Dorong sistem hukum & adat yang akui hak perempuan atas tanah & SDA
3. Alokasikan sumber daya untuk keamanan & kesehatan mental aktivis perempuan

Penguatan Ekonomi & Akses terhadap SDA

Strategi 3 4 6

1. Kembangkan program ekonomi hijau bagi perempuan: ekowisata, pertanian berkelanjutan, energi terbarukan
2. Pastikan akses perempuan terhadap teknologi ramah lingkungan & pembiayaan usaha adaptif iklim

Rekomendasi

humanis

Rekomendasi Untuk Lembaga Donor

Meningkatkan Pendanaan Inklusif & Berperspektif Gender

Strategi 6

1. Alokasikan skema khusus untuk pemberdayaan perempuan
2. Prioritaskan organisasi yang mempromosikan kepemimpinan perempuan dalam isu lingkungan dan iklim

Mempermudah Akses Pendanaan untuk Perempuan & Organisasi Lokal

Strategi 3 6

1. Permudah prosedur pengajuan (lebih adaptif terhadap konteks komunitas akar rumput)
2. Sediakan *small grants* untuk inisiatif lokal yang dipimpin perempuan

Mendorong Kebijakan Pendanaan yang Responsif Gender

Strategi 6

1. Wajibkan penerapan prinsip kesetaraan gender dalam setiap tahapan proyek
2. Sertakan indikator gender dalam pelaporan proyek & dampaknya terhadap perempuan

Mendukung Program Peningkatan Kapasitas Perempuan

Strategi 2 6 7

1. Danai pelatihan kepemimpinan, advokasi, dan keterampilan teknis perempuan di sektor lingkungan
2. Biayai riset dan publikasi yang mengangkat peran perempuan dalam mitigasi & adaptasi iklim

Memfasilitasi Jaringan & Kolaborasi Multi-Stakeholder

Strategi 5 7

1. Dukung platform kolaborasi antara donor, NGO, pemerintah, dan komunitas perempuan
2. Integrasikan perspektif gender dalam forum internasional pendanaan iklim dan tata guna lahan

Menjamin Keberlanjutan Program

Strategi 7

1. Sediakan pendanaan jangka menengah/panjang untuk program kepemimpinan perempuan
2. Sertakan exit strategy yang berpusat pada keberdayaan lokal pasca proyek

Rekomendasi

humanis

Rekomendasi Untuk Sektor Swasta

Integrasi Gender & Inklusi dalam Kebijakan Perusahaan

Strategi 1 6

1. Adopsi kebijakan internal yang mendukung partisipasi perempuan dalam sektor lingkungan dan sumber daya alam
2. Tetapkan target representasi perempuan di posisi strategis, terutama dalam bidang keberlanjutan

Akses Perempuan terhadap Peluang Ekonomi dan Karir

Strategi 3

1. Prioritaskan perekrutan dan promosi perempuan di sektor kehutanan, pertanian lestari, dan energi terbarukan
2. Sediakan pelatihan dan mentoring untuk penguatan kapasitas teknis dan kepemimpinan perempuan

Praktik Bisnis yang Berkelanjutan & Inklusif

Strategi 2 6

1. Terapkan kebijakan pengadaan yang mendukung bisnis milik dan dikelola perempuan
2. Dorong partisipasi perempuan dalam rantai pasok hijau dan bisnis ramah lingkungan

CSR untuk Pemberdayaan Perempuan dalam Iklim & Lingkungan

Strategi 7

1. Kembangkan program CSR *(Corporate Social Responsibility)* yang fokus pada kapasitas perempuan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
2. Berikan akses pelatihan, dana, dan teknologi untuk komunitas perempuan terdampak

Lingkungan Kerja yang Mendukung Perempuan

Strategi 6

1. Sediakan kebijakan kerja fleksibel, cuti melahirkan, dan penitipan anak
2. Ciptakan lingkungan kerja yang aman, bebas diskriminasi dan kekerasan berbasis gender

Kolaborasi & Advokasi Gender-Inklusif dalam Isu Iklim

Strategi 2 6

1. Bermitra dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas untuk kebijakan tata guna lahan yang adil gender
2. Dukung forum dan inisiatif global terkait peran perempuan dalam keberlanjutan

Rekomendasi

humanis

Rekomendasi Untuk Media Massa

Meningkatkan Liputan tentang Peran Perempuan

Strategi 2 6

1. Sediakan ruang khusus untuk kisah sukses perempuan dalam kepemimpinan lingkungan
2. Tampilkan jurnalisme solusi dan narasi keadilan iklim berbasis pengalaman perempuan
3. Perluas liputan tentang kontribusi perempuan dalam tata guna lahan dan inovasi iklim

Mempromosikan Kesadaran Publik tentang Gender & Iklim

Strategi 6 7

1. Jalankan kampanye lintas platform (TV, radio, digital) tentang pentingnya keadilan gender dalam kebijakan iklim
2. Produksi artikel, video, dan podcast yang menampilkan tantangan dan peluang bagi perempuan dalam sektor lingkungan

Meningkatkan Representasi Perempuan dalam Pemberitaan

Strategi 1 6

1. Libatkan perempuan sebagai narasumber utama dalam liputan isu lingkungan
2. Pastikan narasi perempuan hadir dalam berita tentang kebijakan iklim dan tata guna lahan
3. Bangun database tokoh perempuan pemimpin di sektor lingkungan untuk memudahkan akses media

Membangun Kemitraan untuk Edukasi Publik dan Advokasi

Strategi 5 7

1. Kolaborasi dengan akademisi, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan sektor swasta untuk produksi konten edukatif
2. Kembangkan media komunitas yang memberi ruang bagi perempuan pemimpin lokal
3. Latih jurnalis agar mampu menyampaikan liputan berbasis data dan perspektif keadilan gender

Mengadopsi Kebijakan Media yang Inklusif Gender dan Ramah Lingkungan

Strategi 6

1. Terapkan pedoman redaksi yang sensitif terhadap isu gender dan lingkungan
2. Dukung kebijakan internal media yang memperkuat peran perempuan di industri media
3. Tingkatkan keterwakilan perempuan dalam posisi editorial dan peliputan isu iklim